

Pemkab Magelang Terapkan WFH

MAGELANG (KR) - Mengantisipasi penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, Pemkab Magelang akan menerapkan Work From Home (WFH) kembali bagi pegawainya. Hal ini tak lepas dari perubahan zone Covid-19 untuk Kabupaten Magelang, dari zone orange ke merah pada Sabtu (26/6). "Sesuai SE Mendagri dan Gubernur, terkait zona merah ini, maka aktivitas perkantoran di Pemerintah Daerah ini baik PNS maupun ASN diberlakukan WFH sebanyak 75 persen. Artinya 75 persen pegawai kita dapat bekerja dari rumah," ungkap Juru Bicara Covid Kabupaten Magelang, Nanda Cahya Pribadi, Senin (28/6). Untuk pegawai yang 25 persen tetap melaksanakan tugasnya di kantor. Tentunya di Kantor tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kegiatan-kegiatan rapat yang mungkin dengan skala cukup besar bisa dilakukan secara daring.

Saat ditanya untuk para pegawai di perusahaan swasta di Kabupaten Magelang, Nanda mengungkapkan tetap situasional. "Tetapi jika di Pemda saja menerapkan WFH, maka saya juga himbau tetap bisa menerapkan hal yang sama," ungkapnya. Disampaikan, termasuk di usaha perindustrian di Kabupaten Magelang. "Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Disperina, untuk mengimbau kepada pegawai di usaha perindustrian untuk tetap menjaga proses, termasuk pengaturan jam kerja. Kemungkinan bisa mengadopsi yang dilakukan Pemerintah Daerah," pungkasnya. **(Bag)**

FORUM BPD AJUKAN TUNTUTAN

Pemkab Terbitkan Regulasi Insentif

PURWOREJO (KR) Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menerbitkan regulasi terkait pemberian insentif yang layak. Mereka juga meminta pemerintah mengatur tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka di desa.

Ketua Forum BPD Purworejo Kus Pradianto, mengatakan anggota forum berharap pengoptimalan fungsi dan kinerja BPD di desa. Selama ini, BPD jarang dilibatkan secara utuh dalam proses penentuan kebijakan desa. "Peran kami sangat kecil di desa, bahkan terkesan sebagai pelengkap. BPD hanya jadi lembaga yang kerjanya menstempel saja," katanya, Selasa (29/6). Seharusnya BPD memperoleh peran lebih besar dan tidak hanya sebagai tukang stempel. Pemerintah telah membuat payung hukum untuk melandasi peran BPD, yakni berupa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

BPD sebagai representasi keterwakilan masyarakat desa, seharusnya memiliki peran yang kurang lebih sama dengan DPRD/DPR. BPD memiliki antara lain merumuskan berbagai kebijakan bersama pemerintah desa, menjangkau aspirasi masyarakat dan diusulkan menjadi kebijakan, serta melakukan pengawasan jalannya pemerintahan desa. "Harapan kami, setelah diskusi dengan DPRD, ada penguatan tugas dan peran kami di desa," ucap Ketua BPD Desa Joso itu.

Selain itu, Forum BPD Purworejo juga menuntut adanya aturan yang jelas terkait besaran insentif yang diberikan untuk operasional dan tunjangan BPD. "Tidak ada regulasi yang jelas, jumlah insentif hanya tergantung hasil komunikasi internal BPD dengan pemdes, jadi tiap desa berbeda nilainya," ungkapnya. Kus mencontohkan besaran alokasi operasional dan insentif BPD di Desa Joso Rp 12 juta pertahun. Alokasi itu dimanfaatkan untuk lima anggota BPD. "Setiap anggota BPD terima insentif Rp 200.000/bulan. Desa lain belum tentu sama, ada yang lebih kecil, juga ada yang lebih besar," terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Tursiyati mengatakan, anggota Forum BPB Purworejo menyampaikan dua aspirasi utama, yakni terkait tupoksi dan jumlah insentif yang jelas. Mereka juga menagih janji Bupati Purworejo yang disampaikan pada masa kampanye. "Penurunan anggota BPD, dalam kampanye pada intinya disampaikan bahwa beliau menjanjikan (akan ada kenaikan insentif) setelah pelantikan, dan saat ini waktunya mengingatkan. Kami di Komisi I akan mengawal kebijakan itu, tentunya harus memakai mekanisme," paparnya. **(Jas)**

REVITALISASI RAWA JOMBOR

Kembali ke Fungsi Irigasi

KLATEN (KR) - Melalui program revitalisasi, Rawa Jombor di Desa Krakitan, Bayat, Klaten, akan dikembalikan ke fungsi dasar. yakni sebagai infrastruktur irigasi guna menopang pasokan air lahan pertanian. Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Harjaka, Senin (28/6) terkait akan berjalannya tahapan pembangunan Rawa Jombor seluas 198 hektare tersebut.

"Kawasan Rawa Jombor direvitalisasi untuk mengembalikan fungsi dasarnya yang sudah mengalami penurunan. Baik fungsi bangunan, ekonomi maupun sosial. Di sini sangat tampak sekali penurunan fungsi bangunan dari waduk seperti yang dulu sebagai fungsi irigasi dan pengendalian banjir namun kini sudah bergeser ke kepentingan lain. Sekarang Rawa Jombor menjadi objek peternakan ikan, warung apung dan wisata. Harapan ke depan, Rawa Jombor dikembalikan ke fungsi semula, dengan revitalisasi," kata Harjaka. Terkait kondisi terkini, Harjaka menerangkan kalau kondisi Rawa Jombor saat ini sudah banyak mengalami sedimentasi. Faktor penyebabnya sangat banyak, salah satunya akibat pembusukannya enceng gondok. Kondisi rawa saat ini perlu perhatian serius. **(Sit)**



KR-Sri Warsiti

Karamba bertebaran di seputaran Rawa Jombor.

PDAM KABUPATEN MAGELANG JADI PERUMDA

Dewan Pengawas Diutamakan Warga Daerah



MAGELANG (KR) - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magelang yang semula berbadan hukum Perusahaan Daerah perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perubahan ini merupakan salah satu materi yang disampaikan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Magelang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan agenda Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Masa Sidang II Tahun 2021 serta Persetujuan Raperda Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Gemilang, yang digelar Selasa (29/6).

Juru Bicara Pansus II, Soeharno menjelaskan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang yang semula Perusahaan Daerah perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan beberapa pertimbangan. "Untuk mendorong peningkatan etos kerja BUMD, pemangkasan birokrasi dalam BUMD, efisiensi BUMD, orientasi pasar yang kuat dan jelas, peningkatan reputasi BUMD yang baik, peningkatan profesionalisme BUMD, dan penguatan intervensi yang berlebihan Pemerintah Daerah

terhadap BUMD serta kejelasan tujuan profit oriented dalam BUMD," jelasnya.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sarayan Adiyanto beserta para wakil ketua serta anggota tersebut, Soeharno menjelaskan Peraturan Daerah yang baru nantinya dimaksudkan agar ada pengurangan intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMD, sehingga setelah menjadi Perusahaan Umum Daerah nantinya PDAM bisa lebih berkembang.

Dalam pembahasan Pansus II dengan Eksekutif pada tanggal 23 Februari 2021 telah disetujui persyaratan Dewan Pengawas ditambahkan syarat 'Warga Kabupaten Magelang'. Namun, setelah terbitnya surat Gubernur Jateng perihal Hasil Fasilitas

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang (yang kedua), maka 'Warga Kabupaten Magelang' disempurnakan menjadi 'Ditamatkan dari Warga Daerah'.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan dengan berubahnya bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, ia berharap kinerja PDAM semakin mening-

kat guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah. "Perubahan dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis guna menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien," katanya. **(Adv)**



KR-Istimewa

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang.

BEBERAPA DESTINASI WISATA TUTUP SEMENTARA

Dimanfaatkan untuk Berbenah dan Jaga Kebersihan

MAGELANG (KR) - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) kembali melakukan penutupan sementara operasional Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) Magelang, khususnya zona 2, mulai Selasa (29/6) hingga waktu yang belum ditentukan.

Penutupan yang dimulai pada pekan ini dilakukan menyusul penetapan wilayah Kabupaten Magelang menjadi zona merah.

WS GM Borobudur Jamaludin Mawardi kepada wartawan di TWCB, Selasa (29/6) membenarkan penutupan ini untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro dalam rangka mencegah jalannya penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Magelang sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang No-

mor 440.1/1926/01.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang pelaksanaan Gerakan Eling lan Ngelenge (ingat dan saling mengingatkan) serta Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata Pemuda & Olahragra Kabupaten Magelang.

"Menindaklanjuti arahan Bupati Magelang dengan memperhatikan perkembangan situasi epidemiologi di wilayah tersebut, maka TWC mendukung penutupan sementara objek destinasi wisata TWC Borobudur dan berha-

rap melalui penutupan ini bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemulihan pandemi serta ekonomi di Kabupaten Magelang," katanya.

Selama penutupan ini, PT TWC juga terus melakukan kegiatan preventif dalam mengurangi upaya penyebaran Covid-19.

Hal ini dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan destinasi sebagai bentuk komitmen terhadap sertifikasi CHSE yang kami terima dari Kemenparekraf.

Dibenarkan, banyak pengunjung yang sudah datang ke Borobudur. Namun karena ada penutupan sementara, mereka kemudian meninggalkan Borobudur setelah sebelumnya diberi

penjelasan mengenai adanya penutupan sementara tersebut.

"Semoga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dapat tercapai dan didukung oleh semua pihak sehingga kondisi dapat segera membaik, perekonomian dan dunia pariwisata menyusul pulih kembali," kata Jamaludin.

Penutupan sementara juga dilakukan di daya tarik wisata lereng Gunung Sumbing Magelang, tepatnya di Nepal Van Java di Dusun Butuh Kecamatan Kaliangkrik Magelang.

Hal ini dibenarkan Kepala Dusun Butuh Lilik Setyawan kepada KR secara terpisah di rumahnya. Penutupan ini sampai dengan perbaikan status pada risiko epidemiologi Covid-19. **(Tha/Isw)**

Tim Gabungan Tindak Tegas Warung Pelanggar PPKM

KLATEN (KR) - Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu bersama Dandim 0723/Klaten Letkol Inf Joni Eko Prasetyo memimpin aparat gabungan melakukan penutupan tempat-tempat usaha dan warung yang masih buka di atas pukul 21.00 WIB. Penutupan dilakukan Senin (28/6) malam, oleh personel Polres Klaten, Kodim 0723/Klaten, Satpol PP, Dishub dan petugas Dinas Kesehatan.

Edy Suranta menjelaskan tindakan tegas dilakukan sesuai Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 443.5/129 tentang perpanjangan PPKM Mikro. Salah satu poin dalam SE tersebut mengatur bahwa operasional pedagang kakilima (PKL) dan angkringan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

"Untuk mengatasi tingginya penyebaran Covid-19, dilakukan berbagai upaya, di antaranya pembatasan jam buka usaha/warung pada malam hari. Harus kita tegakkan aturan tersebut," kata Edy Suranta.

Tim gabungan menyisir tempat-tempat usaha di sepanjang Jalan Pemuda Klaten, Jalan Merbabu, Jalan Andalas hingga jalan Mayor Kusmanto. Dengan berjalan kaki, para petugas gabungan ini mendatangi

satu-persatu tempat usaha dan warung yang masih buka. Petugas gabungan kemudian meminta pemilik usaha untuk segera menghentikan kegiatannya dan kembali ke rumah.

Penutupan tersebut akan terus dilakukan sampai masyarakat sadar dan disiplin menjalankan instruksi pemerintah khususnya terkait pembatasan jam aktivitas tempat usaha dan warung.

Selain itu pihaknya bersama instansi terkait juga akan terus melaksanakan operasi yustisi untuk pendisiplinan protokol kesehatan 5M.

Salah satu pemilik warung yang enggan disebut namanya, saat didatangi petugas mengatakan sudah berniat tutup, namun masih menunggu tiga pelanggan yang sedang makan. Ia juga mengaku tak keberatan dengan pembatasan jam aktivitas PKL/warung, karena menurutnya hal tersebut upaya pemerintah untuk menekan penularan Covid-19. **(Sit)**



KR-Sri Warsiti

Menggunakan pengeras suara, Kapolres Klaten mengingatkan para pedagang agar segera tutup.

Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah

MAGELANG (KR) - Sebanyak 112 pasien terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Magelang, hingga Senin (28/6) dinyatakan sembuh. Kini tinggal 914 dari 1002 pasien terkonfirmasi positif sehari sebelumnya, yang kini masih dalam penyembuhan. "Hari ini ada tambahan 112 pasien terkonfirmasi yang sembuh. Kita berdoa saja, akan semakin banyak pasien terkonfirmasi yang sembuh. Sebaliknya, semakin sedikit pasien terkonfirmasi baru," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, Selasa (29/6). Terkait hal itu, pihaknya meminta seluruh masyarakat dimana pun berada, untuk menegakkan protokol kesehatan. Apalagi saat musim pancaroba dan peningkatan kasus Covid-19 seperti saat ini. Di tengah meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi, Bupati Magelang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440.1/1926/01.01/2021 tentang Gerakan Eling lan Ngelengake (ingat dan saling mengingatkan) untuk menegakkan protokol kesehatan di manapun berada.

Untuk penambahan 112 pasien terkonfirmasi sembuh, terbanyak dari Kecamatan Grabag 25 dan Tegalrejo 22 orang. Kemudian, Bandongan 11, Salam 9, Candimulyo dan Ngluwar masing-masing 8 orang. Selain itu juga dari Muntilan 7, Tempuran 5, Mertoyudan dan Borobudur 4 orang serta 3 orang di Ngablak dan Secang. "Tambahan pasien terkonfirmasi sembuh hari ini, juga berasal dari Kaliangkrik 2 dan seorang dari Windusari," sebutnya. Nanda mengatakan, ada tambahan lima pasien alih status meninggal. Tiga di antaranya dari Tegalrejo dan satu dari Mertoyudan serta Kaliangkrik. "Hari Senin (28/6) ada tambahan empat pasien meninggal terkonfirmasi baru. Dua dari Tegalrejo dan satu dari Salaman serta Salam. Dengan tambahan ini, jumlah meninggal menjadi 586 orang. Rinciannya, 197 suspek dan 389 terkonfirmasi," lanjutnya. **(Bag)**

Polres Boyolali Gelar Baksos dan Vaksinasi

BOYOLALI (KR) - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Bhayangkara, jajaran Polres Boyolali menggelar bakti sosial (baksos) di kawasan Simpang Siaga Boyolali, Selasa (29/6). Baksos berupa pembagian sembako kepada sopir angkot, pengemudi ojek online, tunawisma, pedagang kaki lima, kusir andong dan disabilitas.

Kapolres Boyolali AKBP Morry Ermond menjelaskan ada 2.000 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Kita membagikan bantuan kepada masyarakat Boyolali yang ke-

betulan terdampak pandemi Covid-19. Kami dari Polres Boyolali berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Boyolali terutama di tengah situasi yang kita ketahui bersama cukup sulit," ujar Morry Ermond.

Selain memberikan bantuan berupa sembako, jajaran Polres Boyolali bersama TNI juga menggelar program Serbuan Vaksinasi Nasional yang serentak dilakukan di 22 kecamatan pada Sabtu (26/6) lalu yang merupakan salah satu strategi dalam menekan penyebaran Covid-19. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat Kota Susu, terbukti dengan banyaknya masya-

rakat yang datang untuk melakukan vaksin melebihi target yang ditentukan.

"Untuk Kabupaten Boyolali kita over target. Dari targetnya kita melaksanakan kegiatan vaksinasi sebanyak 4.000, kita bisa melaksanakan vaksinasi 4.096, nyaris 4.100 ini karena keterbatasan vaksin yang ada (stok),i terang Morry Ermond. Dijelaskan, dengan adanya varian virus baru yang ada di Kabupaten Boyolali, pihak Polres Boyolali bersama para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan. Salah satu upaya edukasi protokol kesehatan secara masif, terstruktur dan sistematis yakni dengan pembatasan aktivitas masyarakat pada

malam hari.

Selain itu, dengan adanya Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 300/2015/5.5/2021 terkait Gerakan Boyolali di Rumah Saja juga dianggap efektif un-

tuk meminimalkan penyebaran Covid-19. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja pada tanggal 27 Juni 2021 dan 4 Juli 2021. **(M-2)**



KR-Mulyawan

Kapolres Boyolali AKBP Morry Ermond beserta jajaran membagikan paket sembako.